

GANDENG SWASTA

Pemkot Bogor Hadirkan Layanan Tes PCR Drive Thru di Mal

BOGOR (IM)- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menghadirkan layanan tes usap (swab test) drive thru di Mal Boxies 123, Tajur, Bogor, Jawa Barat. Layanan swab test dengan sistem drive thru itu bentuk kerja sama antara Pemkot Bogor dengan salah satu klinik swasta bernama Bumame Farmasi. Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim mengatakan, fasilitas kesehatan itu ditujukan kepada masyarakat yang ingin melakukan tes swab dengan metode polymerase chain reaction (PCR) secara mandiri. Dedie menuturkan, masyarakat yang membutuhkan dokumen hasil tes swab PCR untuk perjalanan atau memenuhi syarat keperluan lain dapat memanfaatkan fasilitas layanan sistem drive thru tersebut.

“Masyarakat memiliki pilihan lain selain fasilitas swab yang disediakan oleh pemerintah. Jadi, ini menambah kemudahan bagi masyarakat yang ingin melakukan swab secara mandiri dengan sistem drive thru,” ucap Dedie, Minggu (31/1).

Dedie menambahkan, Pemkot Bogor mendukung kehadiran Bumame Farmasi PCR Swab Test yang ada di Mal Boxies 123. Kehadiran fasilitas itu dapat membantu proses tracing, testing, dan treatment. Ia berharap, nanti-

nya masyarakat bisa lebih mudah menjangkau layanan PCR swab test. Bahkan, sambung Dedie, proses registrasinya tidak terlalu sulit. “Masyarakat tidak perlu lagi ke area rumah sakit untuk swab PCR, akan tetapi dapat memanfaatkan fasilitas layanan sistem drive thru ini,” kata dia.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Sri Nowo Retno menyebutkan, layanan swab test yang ada di Bumame Farmasi tidak jauh berbeda dengan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Hanya saja, karena swab PCR di Bumame Farmasi dilakukan oleh swasta, maka dikenai tarif.

Sementara itu, layanan swab dan pemeriksaan PCR yang dilakukan Pemkot Bogor tidak dipungut biaya alias gratis. Namun, lanjut Retno, layanan swab Pemkot Bogor ditujukan kepada kontak erat hasil tracing kasus konfirmasi positif yang dilakukan tim tracer surveilans puskesmas dan tim detektif Covid-19 kelurahan atau RW Siaga Covid-19.

“Kalau yang dilakukan lab swasta seperti Bumame ini ditujukan untuk swab mandiri, jadi dikenakan tarif. Tentu tarif tidak boleh melebihi tarif yang sudah ditentukan oleh pemerintah, yakni maksimal Rp 900.000,” pungkaskan Retno. • **gio**

Beredar WhatsApp Palsu Bima Arya, Pemkot Bogor Minta Warga Waspada

BOGOR (IM)- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengingatkan warganya agar berhati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan WhatsApp Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto.

Kepala Bidang KIP Dinas Komunikasi dan Informasi (Dis-kominfo) Kota Bogor, Abdul Manan Tampubolon mengatakan, apabila masyarakat mendapat pesan atau informasi yang mencurigakan dari WhatsApp palsu Bima Arya agar segera melapor. Manan juga mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap modus penipuan tersebut.

“Apabila menerima informasi mencurigakan yang mengatasnamakan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto melalui WA dan media sosial, diharapkan untuk mengabaikannya dan segera melaporkannya melalui Aplikasi SiBadra yang dapat diunduh melalui Play Store atau App Store,”

ucap Manan, Sabtu (30/1). Manan menambahkan, sebelumnya akun Facebook orang nomor satu di Kota Bogor itu sempat dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Modus yang dilakukan adalah dengan memberi pesan atau chat di Facebook kepada calon korbannya. Kemudian, pelaku meminta dikirimkan nomor verifikasi enam digit yang ada di ponsel korbannya dengan alasan agar bisa lanjut ke percakapan WhatsApp (WA).

“Jadi, nanti dia akan hack WhatsApp dan melakukan penipuan meminta pulsa di kontak kita,” sebut Manan.

Dirinya mengingatkan, masyarakat yang mendapat pesan menjeruk hal-hal yang tak masuk akal agar mengabaikannya. “Kami imbau kepada siapa pun agar berhati-hati terhadap modus penipuan tersebut,” pungkaskannya. • **gio**

PDAM Resmi Jadi Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor



HASANUDIN TAHIR

Direktur Perumda Air Minum Tirta Kahuripan

BOGOR (IM)- Sejak November 2020, BUMD milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor (Pemkab) Bogor yang bergerak di bidang pelayanan air bersih resmi berubah badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum.

Hal ini disampaikan Direktur PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor yang secara resmi berubah menjadi Perumda Air Minum Kabupaten Bogor, Hasanudin Tahir didampingi Kabid Humas Arfur Fakharirodji saat menanggapi pertanyaan wartawan, di ruangan kerjanya, Jumat (29/1).

“Jadi 39 tahun masyarakat sudah mengenal PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Tirta Kahuripan dalam pelayanan kebutuhan air bersih di Kabupaten Bogor dan kini tepatnya pada tanggal 25 November 2020, PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor resmi berubah menjadi Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor. Hal ini memang harus dilakukan sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah No.54 tahun 2017 tentang BUMD,” kata Hasanudin Tahir panggilan akrabnya Hasan.

Hasan menambahkan, pada Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2017 merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga mengakibatkan dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 ten-

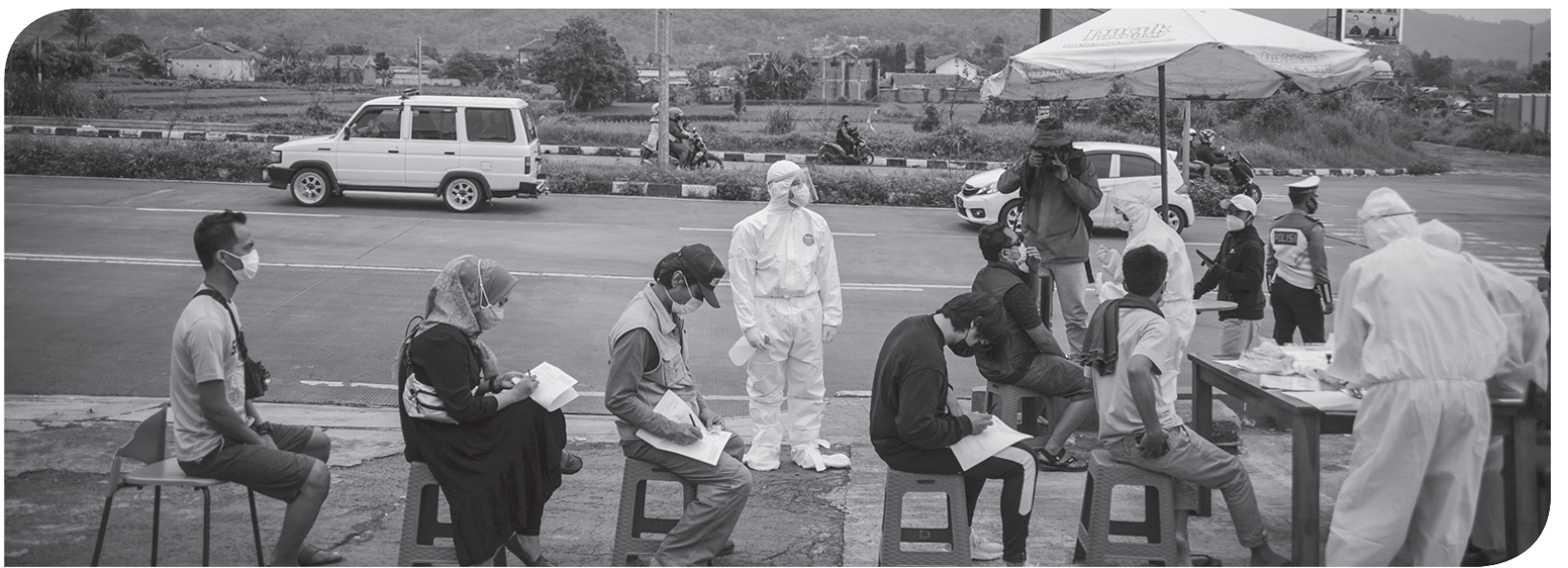
tang Perusahaan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan aturan itulah, tegas Hasan lagi, setelah melalui proses pembahasan-pembahasan yang dilakukan di Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Bogor maka pada tanggal 25 November 2020 perubahan bentuk PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor menjadi Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor mulai berlaku seiring telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.

Dengan perubahan badan hukum ini, Hasan meyakini, ada beberapa hal yang berubah ketika menjadi Perumda Air Minum, di antaranya di dalam hal organ, komite audit, dan Satuan Pengawasan Internal. “Dengan menjadi Perumda Air Minum, kami berharap dapat lebih fokus dalam pelayanan kepentingan umum (air minum) di samping meningkatkan keuntungan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tuturnya.

Dia berharap, semoga perubahan bentuk hukum ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan, semakin memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan khususnya kepada pelanggan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor. • **gio**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

TES CEPAT ANTIGEN BAGI WISATAWAN

Petugas kesehatan mendata wisatawan yang akan berlibur di kawasan wisata sebelum menjalani tes cepat antigen di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (31/1). Tes cepat antigen yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung tersebut dilakukan secara acak sebagai langkah antisipasi penyebaran COVID-19 dari wisatawan yang datang dari luar Kota Bandung.

MUTASI BESAR-BESARAN DI TENGAH PANDEMI

Bupati Bandung Barat Kosongkan Jabatan Kadinkes KBB

Ini aneh dan sangat di luar nalar.

Mengosongkan jabatan kepala dinas kesehatan di saat kasus Covid-19 di KBB masih tinggi dan vaksinasi Covid-19 sedang berjalan, kata anggota DPRD Bandung Barat, Dadan Supardan.

BANDUNG (IM)- Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna melakukan mutasi dan rotasi besar-besaran dengan menggeser 500 pejabat baik jabatan tinggi pertama hingga jabatan fungsional lainnya. Pergeseran sekitar 500 pejabat tersebut justru malah meninggalkan lubang di sejumlah

dinas ditambah adanya pembentukan organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KBB, Asep Ilyas menjelaskan kekosongan pejabat eselon II itu lantaran ada pejabat yang meninggal dunia serta ada dua

OPD yang baru dibentuk.

“Pertama Dinas Kesehatan masih kosong, lalu Disnakertrans kemudian Damkar, dan Bappenda. Selain itu, Kesbangpol juga saat ini masih kosong karena baru naik status menjadi badan,” kata Asep Ilyas, Minggu (31/1).

Oleh karena itu Pembk Bandung Barat akan melaksanakannya lelang jabatan (open bidding) bagi jabatan tinggi pertama. Hal itu menyusul ada kekosongan pejabat eselon 2 di lima OPD.

Di lima OPD tersebut saat ini untuk sementara dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) melalui Surat Perintah (SP) yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten

Bandung Barat.

“Ya, jadi itu untuk kegiatan lelang jabatan dan sebagainya, memang sudah disesuaikan dengan situasi dan kondisi di masa pandemi seperti ini,” jelasnya.

Kadinkes Dikosongkan

Usai mutasi dan rotasi, Kepala Dinas Kesehatan KBB digeser menjadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM. Padahal saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19. “Ini aneh dan sangat di luar nalar. Mengosongkan jabatan kepala dinas kesehatan padahal kasus Covid-19 di KBB masih tinggi dan vaksinasi Covid-19 sedang berjalan,” kata anggota DPRD Bandung Barat, Dadan Supardan.

Menurutnya, peran Kepala

Dinas Kesehatan begitu penting dalam kondisi saat ini. Di lapangan, masyarakat yang terpapar Covid-19 masih terus meningkat secara kuantitas.

“Berbagai kebijakan penting dan cepat harus dilakukan oleh kepala dinas definitif dan akan berbeda bobotnya ketika dilakukan oleh seorang Plt kepala dinas,” tuturnya.

Fungsi pengendalian juga koordinasi dalam sektor pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19 harus terencana secara tepat dan sempurna. “Saya pikir untuk kondisi sekarang Covid-19 lebih prioritas adalah Kepala Dinas Kesehatan daripada harus mengisi orang ke jabatan staf ahli,” ujarnya. • **pur**

Yogyakarta Ingin Memulai Vaksinasi Lebih Awal untuk Masyarakat

YOGYAKARTA (IM)- Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta, DIY berharap, bisa memperoleh vaksin Sinovac untuk masyarakat umum lebih awal supaya bisa memulai vaksinasi lebih awal.

Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Yogyakarta, Heroe Poerwadi di Yogyakarta, Minggu (31/1) mengatakan, vaksinasi pada tenaga kesehatan diharapkan selesai Maret 2021, dan dilanjutkan dengan vaksinasi pada sasaran berikutnya. “Proses selanjutnya akan dilakukan kepada (petugas) pelayanan publik, dan lansia,” katanya.

Heroe memperkirakan, vaksinasi aparat pelayanan publik, warga lanjut usia (lansia), dan masyarakat umum sudah bisa dilakukan pada April 2021.

“Nantinya kelompok masyarakat umum pun akan dibagi dalam beberapa klaster. Tetapi, kami berharap Kota Yogyakarta bisa memperoleh vaksin lebih cepat supaya vaksinasi bisa dilakukan lebih awal,” katanya.

Nantinya, warga akan mendapat pemberitahuan un-

tuk menjalani vaksinasi melalui pesan dari aplikasi Peduli Lindungi. “Jadi, sabar menunggu pesan dan antrean. Kalau sudah saatnya mendapat vaksinasi, pasti akan mendapat pemberitahuan,” kata Heroe.

Saat ini, menurut dia, Pemerintah Kota Yogyakarta masih menunggu mekanisme pendataan anggota masyarakat yang akan memperoleh vaksinasi. “Kalau untuk tenaga kesehatan sudah jelas datanya. Nah, untuk masyarakat ini yang belum tahu bagaimana proses pendataannya. Sampai sekarang kami menunggu petunjuk bagaimana mengawali pendataannya, termasuk nantinya klaster mana dulu yang akan diprioritaskan,” katanya.

Meskipun demikian, Heroe memastikan, fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Yogyakarta sudah siap melaksanakan vaksinasi Covid-19 pada aparat pelayanan publik dan masyarakat umum. Saat ini ada 31 fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan vaksinasi Covid-19 di Kota Yogyakarta, yang meliputi 18 pus-

kesmas, 11 rumah sakit, dan dua klinik yang dikelola Polresta Kota Yogyakarta.

Menurut Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Yogyakarta, sepanjang Januari 2021 tidak ada kenaikan signifikan tiba-tiba dalam grafik temuan kasus Covid-19.

“Grafik temuan kasus setiap harinya cenderung landai. Meskipun sempat ada kenaikan tetapi hal itu disebabkan adanya alat laboratorium yang rusak sehingga antrean sampel menumpuk. Secara umum, grafik datar,” kata Heroe.

Pada Sabtu (30/1) ada tambahan 40 kasus Covid-19, 72 pasien sembuh atau selesai isolasi mandiri, dan enam pasien meninggal dunia akibat infeksi virus corona di Kota Yogyakarta.

Di Kota Yogyakarta, jumlah total kasus Covid-19 aktif tercatat 640 kasus, jumlah pasien yang sembuh dari infeksi virus corona seluruhnya 2.989 orang, dan jumlah pasien yang meninggal dunia karena penyakit itu total 163 orang. • **pra**

Suara Dentuman di Tangsel, Ini Penjelasan BMKG

TANGSEL (IM)- Suara dentuman yang terjadi pada Sabtu (30/1) membuat warga di Kelurahan Muncul, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, gempar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan, suara dentuman tersebut bukan bersumber dari kegempaan dan petir.

“Berdasarkan hasil analisa dari rekaman alat monitoring aktivitas kegempaan terdekat dengan lokasi, yaitu seismograf di Pondok Aren (PII) dan rekaman alat monitoring aktivitas petir di Stasiun Geofisika Klas 1 Tangerang bahwa suara dentuman yang terdengar oleh masyarakat Kelurahan Muncul, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, bukan berasal dari aktivitas kegempaan maupun petir,” jelas Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Tangerang, Suwardi dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (31/1).

Suwardi mengatakan, pihaknya memperoleh laporan dari masyarakat tentang suara dentuman yang terjadi pada sekira pukul 10.30 WIB tersebut. Suara dentuman, kata dia, bisa disebabkan enam hal. Pertama, akibat asteroid yang dapat memicu gelombang kejut ketika jatuh dengan kecepatan supersonik. Gelombang kejut tersebut yang terdengar sebagai suara dentuman. Kedua, gelombang kejut yang kuat selama erupsi gunung api. Ketiga, ada pesawat dengan kecepatan supersonik melintas. Adapun, penyebab keempat adalah gempa sangat dangkal yang dapat mengeluarkan suara dentuman. Kelima, ledakan dari bahan peledak, seperti dari adanya latihan militer, tradisi penghormatan di militer, ledakan blasting tambang, dan eksplorasi seismik. Terakhir, karena petir dalam kondisi cuaca dan jarak tertentu yang dapat terdengar seperti suara dentuman.

Dalam keterangannya, Suwardi memaparkan terkait aktivitas kegempaan dan petir. Berdasarkan hasil monitoring Stasiun Geofisika Klas 1 Tangerang, diketahui tidak ada aktivitas kegempaan. “Termonitor tidak ada aktivitas kegempaan pada pukul 10.15 hingga 10.45 WIB,” terangnya.

Sama halnya dengan aktivitas petir, hasil monitoring menunjukkan tidak adanya aktivitas petir. “Termonitor tidak ada aktivitas petir pada pukul 10.30 WIB. Cuaca di Tangerang Selatan pada tanggal 30 Januari 2021 pukul 10.30 WIB pada kondisi hujan ringan (gerimis) dengan suhu udara sekitar 25,8 derajat celsius, kelembaban 94 persen,” jelasnya.

Dengan demikian, dia menyimpulkan, suara dentuman tersebut bukan berasal dari aktivitas kegempaan ataupun petir. • **pp**

Komisi I DPRD Jabar Dorong Optimalisasi Aset Pemprov Jabar

BANDUNG (IM)- Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat kaji pengelolaan dan inventarisasi asst-aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Persoalan status kepemilikan, administrasi dan pengelolaan masih menjadi pembahasan dalam tata kelola aset tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk menginventarisasi aset-aset daerah agar lebih terbit dalam pengelolaannya. Laban-laban tidur dan aset bangunan agar tak terbengkalai dan berdaya guna agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari.

“Jadi kita harus mengkaji lebih dalam bahwa persoalan aset ini adalah persoalan warisan. Warisan masalah yang sudah turun temurun dan ini pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan,” ujar Bedi dalam kunjungan Komisi I DPRD Jabar di Gedung Bakorwil IV, Kabupaten Garut, Kamis



(28/1/2021).

Dia mencontohkan, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang sudah teratur SOTK yang cukup banyak bisa disatukan dalam satu wilayah. Sehingga ada efisiensi dan pemanfaatan yang lebih tertata.

Beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menertibkan aset di antaranya pengorganisasian dari leading sector yang menanganinya. Menurutnya, institusi yang menangani aset kapasitasnya terlalu kecil. Seharusnya ada institusi khusus

untuk menangani aset yang memiliki kapasitas, kewenangan, kapasitas anggaran yang mumpuni untuk melakukan kegiatan prinsip mengenai aset.

“Prinsip yang pertama adalah inventarisasi, sertifikasi, kemudian mengklasifikasikan mana kategori (dikategorisasi) yang sudah bersertifikat mana yang masih dalam sengketa, mana yang masih dalam status pengusahaan saja,” jelasnya.

Selain itu, bila tak dipelihara aset rawan dikuasai pihak lain. Caranya, lanjut Bedi, dengan



perawatan dan didayagunakan bekerjasama dengan pihak lain.

“Sehingga bisa menghasilkan pendapatan, misalnya tanah itu dikerjakannya dengan pihak swasta, UKM, Koperasi bila di perkotaan, untuk pertanian, perkebunan dan pengolahan bila di pedesaan. Jadi tidak dibiarakan terbengkalai,” jelasnya.

Bedi menegaskan, Komisi I berkomitmen untuk melakukan pengawasan tentang status aset mengingat dari data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat ma-

sih ada sekitar 4.545 aset milik Pemprov Jabar berupa tanah belum bersertifikat.

“Kami komitmen mengawasi ini, bagaimana caranya penegakan hukum, legal standingnya. Sekarang ini kan kalau kita bicara mana aset ini, titiknya di mana yang ada cuma ada tumpukan data. Saya berharap kedepannya ada mapping peta interaktif atau peta digital yang menunjukkan di mana lokasi, luas dan status kepemilikan,” tegasnya. • **lys**